

**IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG
KEPEMUDAAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
*TANFIDZIYAH***

(Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar
Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

FARIDATUL MAHFUDHOH

NPM 1821020424



Program Studi : Hukum Tata Negara (Syiasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H /2022 M

**IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH***

(Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono
Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

Diajukan Untu Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas Syari'ah



Oleh :

Faridatul Mahfudhoh

NPM 1821020424

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H /2022 M

ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dalam rangka pengendalian pemuda, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan seharusnya dapat diterapkan dengan baik bagi para pemuda maupun masyarakat. Pemuda sebagai manusia yang masih mempunyai idealisme dan kecakapan dalam menentukan semangat perubahan haruslah berada diruang penyeimbang yang dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi ke depan. Namun saat ini yang terjadi masih terdapat pemuda yang melenceng dari perannya sebagai pemuda, terdapat pemuda yang tidak membawa kemaslahatan untuk lingkungannya seperti yang diupayakan oleh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Pada praktiknya yang terjadi di Desa Bandar Agung terdapat pemuda yang belum berperan aktif terhadap lingkungan, serta pemuda yang masih berkelompok tidak saling bertoleransi antara pemuda lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu 1. Bagaimana Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono? Dan 2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Pengimplementasian Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono serta untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengobservasi daerah penelitian terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara, pengamatan serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono belum di terapkan secara maksimal. Masih terdapat pemuda yang

tidak melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, selain itu juga terdapat pemuda yang tidak mentaati peraturan pemerintah mengenai peran aktif pemuda melalui Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan ini. Kurangnya partisipasi pada diri setiap individu untuk melaksanakan peraturan sesuai dengan yang di buat oleh pemerintah. Dan ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan ini belum sejalan dengan konsep *fiqh siyasah tanfidziyah* karena didalam *fiqh siyasah tanfidziyah* terdapat konsep yang diantaranya membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara, sedangkan aturan ini belum terimplementasikan dengan baik sehingga belum sesuai dengan pandangan *fiqh siyasah tanfidziyah*.

Kata Kunci : *Peraturan Pemerintah, Peran, dan Pemuda.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faridatul Mahfudhoh

NPM :1821020424

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklum.

Bandar Lampung, 28 Juni 2022

Penulis,



Faridatul Mahfudhoh

NPM 1821020424



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi Skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Faridatul Mahfudhoh
NPM : 1821020424
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

MENYETUJUI

Untuk dimunafosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Reha Nur Ed., S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II


Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)” disusun Oleh, Faridatul Mahfudhoh, NPM : 1821020424, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua	: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Abidin Latua, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji Utama	: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I	(.....)
Penguji Pendamping I	: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I	(.....)
Penguji Pendamping II	: Arif Fikri, S.H.I., M.Ag	(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Ena Rodiah Nur, M.H.
NIDN 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩
(النساء/4:59)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu. Maka
Kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul
(Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan
Hari kemudian”. (An-Nisa/4:59)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi penulis persembahkan kepada:

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya.
2. Kedua orang tuaku Bapakku Sutono dan Ibuku Sriani, yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku dan cita-citaku. Untuk kedua orang tuaku terimakasih selalu ada untuk menguatkanmu, merawatmu, memberikan dukungan, motivasi, dengan memberikan nasehat-nasehat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terimakasih kepada Bude dan Pakde, Bude Sumaiyah dan Pakde Yanto yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan ku.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku untuk menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Faridatul Mahfudhoh putri tunggal yang merupakan anak dari pasangan Bapak Sutono dan Ibu Sriani, yang lahir di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada Tanggal 13 Januari 2000.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu :

1. Pada tahun 2007 sampai 2012 penyusun menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 04 Bandar Agung
2. Pada tahun 2012-2015 penyusun menempuh pendidikan di SMP Mitra Bhakti
3. Pada tahun 2015 sampai 2018 penyusun menempuh pendidikan di SMAN 1 Sekampung Udik
4. Pada tahun 2018 penyusun menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah (Studi di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lapung Timur)”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dinanti-nantikan syafa’atnya di yaumul akhir kelak.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II, penulis ucapkan terimakasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan

kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung

6. Kepada Bapak Kamidi selaku Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran perangkat Desa, saya mengucapkan terimakasih karena telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Desa Bandar Agung.

7. Pemuda dan Tokoh Masyarakat Desa Bandar Agung yang sudah bersedia membantu dalam informasinya yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga skripsi karya ini dapat bermanfaat.



Bandar Lampung, 28 Juni 2022

Penulis,

Faridatul Mahfudhoh

NPM 1821020424

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	18
B. Siyasah Tanfidziyah	21
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	21
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah.....	22
3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah	23

4. Pembagian Kekuasaan Al-Sultan Al-Tanfidziyah	26
C. Kepemudaan	29
1. Pengertian Pemuda	29
2. Karakteristik Peranan Pemuda	30
3. Hak dan Kewajiban Pemuda	33
D. Pemuda Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	34

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Bandar Agung	37
1. Sejarah Singkat Desa Bandar Agung	37
2. Letak Geografis dan Struktur Organisasi Desa Bandar Agung	38
3. Visi Misi Desa Bandar Agung	40
B. Penerapan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur	42

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur	49
B. Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	58

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Bandar Agung 39



DAFTAR TABEL

Table

3.1 Batas Wilayah Desa Bandar Agung.....	38
3.2 Kondisi Geografis Desa Bandar Agung.....	40
3.3 Orbitas Jarak Dari Pusat Pemerintahan Desa Bandar Agung..	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : daftar pertanyaan wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Pra Riset dari UIN Raden Intan Lampung
- Lampiran 3 : Balasan Pra Riset dari Desa Bandar Agung
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian PTSP Lampung Timur
- Lampiran 6 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung
- Lampiran 7 : Surat Izin Riset dari Desa Bandar Agung
- Lampiran 8 : Data Penelitian
- Lampiran 9 : Dokumentasi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 13 : Lembar Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka dalam bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul ini sebagai berikut ;

“Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Siyasa Tanfidziyah”. Judul terdiri dari beberapa istilah pokok yaitu:

1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan. Istilah ini diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah di susun.¹

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah Undang-undang yang mengatur tentang kepemudaan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.² Undang-Undang ini juga menegaskan pasal 17 Ayat (1) bahwa peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum.

3. Perspektif

Makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merujuk kepada arti sudut pandang ataupun pemikiran. Perspektif bisa

¹ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

²Dokjdih, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan," June 26, 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf.

dimaksud bagaikan metode seseorang dalam memperhitungkan sesuatu yang dapat dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.³

4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tugas melaksanakan undang-undang.⁴

Dari penjelasan tentang pengertian-pengertian istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian yang membahas mengenai persoalan Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur).

B. Latar Belakang Masalah

Pemuda sebagai manusia yang masih mempunyai idealisme dan kecakapan dalam menentukan semangat perubahan haruslah berada diruang penyeimbang yang dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi ke depan. Mengingat pemuda sebagai *agent of change* dan *agent controlling* dalam sebuah perubahan tentu pemuda harus menjadi solusi ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan menyabut perubahan. Sehingga, peran aktif pemuda memang selalu diharapkan tanpa terkecuali dalam suatu lingkup masyarakat.

Didalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insan bagi perubahan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Pemuda adalah generasi penerus dari generasi terdahulu. Anggapan itu merupakan beban moral

³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ‘Perspektif,’” accessed June 26, 2022, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

yang ditanggung bagi pemuda untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan generasi tua.

Indonesia adalah proyek bersama yang belum selesai. Jiwa nasionalisme kaum muda yang bukan dibentuk oleh rezim, melainkan batin nurani akan menjadi kekuatan yang tangguh bagi keberlangsungan sebuah bangsa, peradaban yang tangguh disokong oleh kepemimpinan yang tangguh juga, kepemimpinan yang tangguh dapat dilihat pada diri pemuda.⁵

Kaum muda sebagai komponen intelektual progresif menjadi arti penting bagi cikal bakal lahirnya sebuah peradaban yang tangguh. Nasionalisme pemuda merupakan jaminan perubahan bagi bangsa, konteks ketahanan Nasional bangsa Indonesia pemuda memiliki peran yang sangat besar dan signifikan dalam rangka meningkatkan stabilitas nasional dan konstruksi Indonesia. Indonesia butuh pemimpin baru yang lebih segar, yang lebih progresif, yang dinamis, yang paling penting adalah yang berani mengatakan kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan keburukan adalah keburukan. Dimulai dari hal-hal kecil yang dapat memicu perubahan bagi peradaban bangsa. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kehidupan social masyarakat, dengan tujuan supaya kehidupan masyarakat berada dalam kondisi yang berimbang.⁶

Pemuda merupakan aset terpenting untuk negara, bangsa, dan agama. Pemuda adalah aset yang sangat mahal dan paling penting dalam kehidupan, selain memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan progresif, pemuda juga merupakan harapan dimasa depan. Karena pemuda bukan hanya harapan regenerasi, tetapi bibit-bibit yang akan melanjutkan peradaban sampai akhir zaman.⁷

⁵ Yuanica Nurmalisa, *Pendidikan Generasi Muda*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Media Akademia, 2017) 4.

⁶ M. Solly Lubis, *Umat Islam Dalam Globalisasi* (Jakarta: Gema Insani, 1997) 68.

⁷ Salahuddin Al Asadullah, "Peran Pendidikan Karakter dalam Membentuk Kemampuan Berfikir Kritis Generasi Muda Indonesia," *Kaisa : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1 (n.d.): 13.

Dalam Al-Qur'an ada dua kata yang digunakan tentang pemuda yaitu, *fata* dan *fatiyah*. Kedua kata ini ditujukan kepada tokoh-tokoh baik, seperti Nabi Ibrahim, murid Nabi Musa, sedangkan yang digunakan dalam hadis adalah *syab* dan *syabab*. Konteks penggunaan kata ini seperti pemuda yang akan dinaungi pada hari akhir kelak.⁸ Sementara itu dalam al-qur'an dan sunnah, pemuda menjadi pembicaraan terutama perannya dalam kehidupan dan berjuang di jalan Allah. Dalam konteks keislaman, nabi memberikan perhatian dan perlakuan khusus bagi pemuda. Pemuda di zaman Rasulullah, mereka diberikan waktu dan tempat khusus untuk belajar karena Rasulullah tahu betapa besar perannya dimasa depan. Islam menjadi lebih buruk atau lebih baik di masa depan itu ya tergantung pemudanya, karena anak muda menjadi mayoritas masyarakat, bisa menjadi bencana demografi atau bonus demografi. Dalam pandangan Islam pemuda yang baik adalah yang berkarakter Ashabul Kahfi dan beriman. Pemuda Ashabul Kahfi akan mendapat kemuliaan dimata Allah. Dengan keyakinan dan keimanan akan selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga merasa malu untuk bermaksiat walaupun tidak ada manusia yang melihat.⁹ Karakter pemuda baik menurut Islam yang selanjutnya adalah harus menjadi pribadi yang positif, artinya ingin selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Pemuda harus menjadi pribadi yang mampu membuat tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik, bahkan dalam al-qur'an pun yang disebutkan adalah kata pemuda, bukan siapapun.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adalah pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencatat peran penting pemuda. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adalah bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu

⁸ Muhammad Anshori, "Pemuda Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.14421/living-hadis.2016.0102-04>.

⁹ Ana Urfiyanti, M. A. Dr. M. Muinudinillah Basri, and M. Ag Dr. Syamsul Hidayat, "Konsep Dakwah 'Â'Idh Al-Qornî Dalam Pembinaan Pemuda Islam" (s2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <https://doi.org/10/bab%204.pdf>.

tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi perubahan perlu di tingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kebhinekaan, Demokratis, Kesenjamaan, dan Kemandirian.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 17 ayat (1) peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan :

- a. Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan
- b. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual
- c. Meningkatkan kesadaran hukum.

Kehidupan pemuda tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, tentu harus ada upaya yang dilakukan agar membawa kemaslahatan pada lingkungan, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, sikap tegas dan frontal diperlukan jika terjadi adanya ketidak seimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Peran pemuda harus sigap menuntas.

Namun saat ini yang terjadi banyak sekali terdapat pemuda yang melenceng dari perannya sebagai pemuda, terdapat pemuda yang tidak membawa kemaslahatan untuk lingkungannya seperti yang diupayakan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 17 Ayat (1) Mengenai Peran Aktif Pemuda. Praktiknya yang terjadi tidak di Desa Bandar Agung terdapat 2 orang pemuda yang terjerat kasus narkoba, sikap pemuda yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengajian mingguan di masjid dan sikap tidak peduli dengan lingkungan masyarakat.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 17 Mengenai Peran Aktif Pemuda di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam hal ini penulis hanya fokus meneliti Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyash Tamfidziyah (Studi di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

2. Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 17 Mengenai Peran Aktif Pemuda pada ayat (1).

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengimplementasian Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca dan penulis untuk memperluas pengetahuan dan juga untuk dijadikan sebagai rujukan penelitian berikutnya khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan pelaksanaan Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan, penelitian tersebut dilakukan ditempat penelitian yang berbeda dan dengan pemaparan yang berbeda.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai yang terdapat pada penelitian sebelumnya.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Aprilia Fitriani (2012) dengan judul “Kedudukan dan Peranan Pemuda Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Warga Negara Dalam Mempertahankan Negara”. Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemuda dalam mempertahankan negara berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, tentang bagaimana ketentuan peran pemuda sebagai bagian dari warga negara Indonesia dalam

mewujudkan ketahanan nasional juga peran serta pemerintah yang saling bersinergi dalam memfasilitasi segala kegiatan kepemudaan demi terwujudnya ketahanan nasional.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah tempat penelitian.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya Indra Budi (2017) dengan judul “Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di Kalangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan”. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada kriteria atau definisi pemuda pemuda secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui penerapan hukum undang-undang kepemudaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat dan konsekuensi hukum terhadap penerapan hukum kriteria pemuda di kalangan organisasi kepemudaan,¹¹ persamaan dari ini penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan peranan pemuda terhadap lingkungan masyarakat.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Tasnim Rahman (2021) dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dalam Meningkatkan Fungsi Karang Taruna”. Skripsi tersebut membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dalam Peningkatan Fungsi Karang Taruna. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk meneliti bagaimana fungsi organisasi kepemudaan menurut UU RI

¹⁰ Annisa Aprilia Fitriani, "Kedudukan Dan Peranan Pemuda Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Warga Negara Dalam Mempertahankan Negara" (Skripsi: Universitas Pakuan Bogor, 2012).

¹¹ Jaya Indra Budi, "Penerapan Hukum Kriteria Pemuda Di Kalangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan" (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017) 9.

Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan bagaimana pengimplementasian UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dalam fungsi karang taruna. Penelitian tersebut adalah penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi Sosiologi Hukum dengan teknik analisis data yang dilakukan dengan reduksi data.¹²

Dalam penelitian ini memiliki persamaan pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, namun dalam penelitian tersebut fokus dalam peningkatan fungsi karang taruna.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, mengganti, mengolah dan membahas data dalam memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.¹³ Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁴

b. Sifat Penelitian

¹² Tasnim Rahman, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dalam Meningkatkan Fungsi Karang Taruna* (Skripsi: UIN Jambi, 2021).

¹³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹⁴ Cholid Narbuko Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi satu hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁵ Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, kemudian peneliti mengalaisanya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan saat ini.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa peneliti berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi dan bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penelitian teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

2. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 3.

maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti,¹⁶ yaitu pemuda Desa Bandar Agung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, majalah, koran, jurnal dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁷ Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain, buku-buku yang membahas tentang Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah.

3. **Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti, dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah pemuda Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribahowono

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, cet 12 (Bandung: Alfabeta, 2011)225.

¹⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 23.

Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 110 orang pemuda dan Kepala Desa serta 1 orang tokoh masyarakat.

b. Sampel

Sampel adalah contoh refresentatif atau wakil dari satu populasi yang suku besar jumlahnya. Tujuan penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*representative*). Dalam penelitian ini populasinya adalah pemuda, tokoh masyarakat, dan kepala Desa Bandar Agung. Berdasarkan populasi tersebut penulis mengambil sampel yang berjumlah 6 orang yang dianggap mewakili populasi dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- a. 4 orang pemuda Desa Bandar Agung
- b. Kepala Desa Bandar Agung
- c. 1 orang tokoh masyarakat Desa Bandar Agung

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan, serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti. Maka dalam hal ini peneliti mengamati langsung para pemuda di Desa Bandar Agung. Tempat yang dijadikan observasi adalah Desa Bandar Agung

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk

memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸ Selanjutnya, S. Margono berpendapat bahwa, *interview* adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi (*interview*) dan sumber informasi (*interview*)¹⁹. Dengan demikian penelitian menggunakan wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap secara terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah beberapa pemuda Desa Bandar Agung, Kepala Desa Bandar Agung dan, dan beberapa tokoh masyarakat Desa Bandar Agung.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan di telaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data

¹⁸ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 225.

¹⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 165.

yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.²⁰

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar data diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan.

6. Analisis Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis induktif. Metode induktif, yakni analisis yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang di tinjau dalam pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

²⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993) 104-105.

²¹ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015) 58.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini adalah :

Bab satu berisikan uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasidan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori pengertian fiqh siyasah tanfidziyah, ruang lingkung fiqh siyasah tanfidziyah, dasar hukum fiqh siyasah tanfidziyah, pembagian kekuasaan al-sulthah al-Tanfidziyah, dan kajian tentang Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Bab tiga berisikan mengenai deskripsi objek penelitian diantaranya adalah gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data penelitian.

Bab empat berisikan mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian yang meliputi Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dan Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam. Hal ini penulis akan menyimpulkan inti dari keseluruhan dan juga saran yang diperlukan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

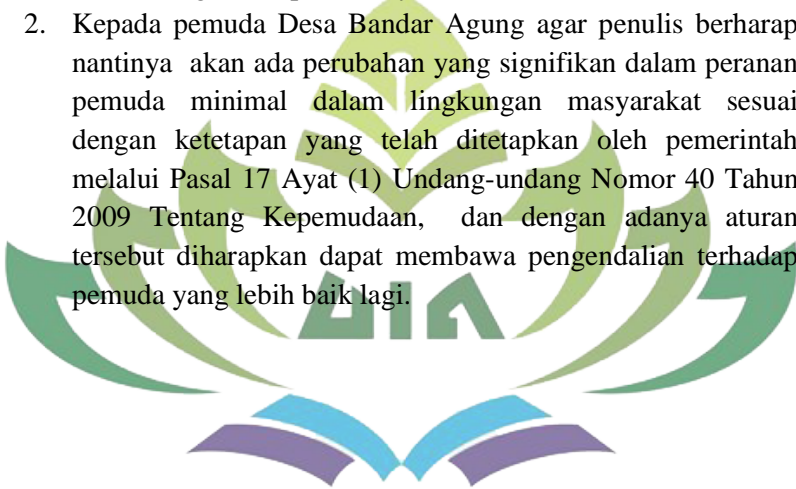
Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang digunakan kemudian dianalisis dengan teori yang telah di paparkan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat pemuda yang tidak menerapkan aturan Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga masih terdapat pemuda yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah ini. Kurangnya partisipasi pemuda dalam menjalankan perannya sebagai pemuda dalam lingkungan masyarakat menjadi faktor penghambat terlaksananya peraturan tersebut.
2. Dalam perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* terhadap Impementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur masih belum sejalan dengan konsep *fiqh siyasah tanfidziyah*, karena didalam *fiqh siyasah tanfidziyah* terdapat konsep yang diantaranya membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi, sedangkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan belum di terapkan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aturan ini belum ada timbal balik dari masyarakat secara maksimal untuk menerapkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa setempat maupun pusat agar dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi kepada pemuda yang tidak menerapkan peraturan tersebut, agar peran yang dilakukan pemuda lebih kreatif, tidak pasif ataupun kurangnya gerakan dalam berperan di lingkungan masyarakat agar sekiranya para pemuda memperoleh bimbingan dan motivasi. Sebab peran aktif pemuda dapat terwujud apabila ada semangat dari pemudanya itu sendiri.
2. Kepada pemuda Desa Bandar Agung agar penulis berharap nantinya akan ada perubahan yang signifikan dalam peranan pemuda minimal dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, dan dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat membawa pengendalian terhadap pemuda yang lebih baik lagi.



DAFTAR RUJUKAN

1. Buku

- Abdillah, Taufik. *Pemuda Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Jalan Sutra, 2010.
- Abu Ahmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Al-Aziz, Absul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asadullah, Salahuddin Al. "Peran Pendidikan Karakter dalam Membentuk Kemampuan Berfikir Kritis Generasi Muda Indonesia." *Kaisa : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1 (n.d.): 13.
- Azra, Azyumardi. *Generasi Muda Yang Agamis Dan Berbudaya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni, 2005.
- Djazuli, H. A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Medi, 2005.
- Fahmi, Abu. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.

- Nurmalisa, Yuanica. *Pendidikan Generasi Muda*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Media Akademia, 2017.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- . *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Solly Lubis, M. *Umat Islam Dalam Globalisasi*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Cet. 12. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tahir Azhari, Muhammad. *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Cet. Ke-1. Bogor: Kencana, 2003.
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Jurnal

- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–18. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Anshori, Muhammad. "Pemuda Dalam Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.14421/living-hadis.2016.0102-04>.
- Paramadina, Panggih Fadhilla, and M. Yasin Al Arif. "Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 74–93. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.
- Urfiyanti, Ana, M. A. Dr. M. Muinudinillah Basri, and M. Ag Dr. Syamsul Hidayat. "Konsep Dakwah 'Â'Idh Al-Qornî Dalam Pembinaan Pemuda Islam." S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. <https://doi.org/10/bab%204.pdf>.

3. Wawancara

- Aditya Nurrohman, "Peran Pemuda Desa Dalam Penerapan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan", *Wawancara*, Agustus 2022.

- Efy Yuliana, "Peran Pemuda Desa Dalam Penerapan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan ", *Wawancara*, Agustus 2022.
- Junaidi, "Peran Tokoh Masyarakat Desa Bandar Agung Dalam Penerapan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan", *Wawancara*, 09 Maret 2022.
- Kamidi, "Peran Pemerintah Desa Bandar Agung Dalam Penerapan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan", *Wawancara*, Agustus 2022.
- M. Imron Syafi'i, "Peran Pemuda Desa Dalam Penerapan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan", *Wawancara* Agustus 2022.
- Muhammad Fadillah, "Peran Pemuda Desa Dalam Penerapan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan", *Wawancara*, Agustus 2022.

4. Internet

- Budi, Jaya Indra. *"Penerapan Hukum Kriteria Pemuda Di Kalangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan"*. Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- "Dokjdih, 'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan',." Accessed June 26, 2022. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf.
- Fitriani, Annisa Aprilia. *Kedudukan Dan Peranan Pemuda Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Warga Negara Dalam Mempertahankan Negara*. Skripsi: Universitas Pakuan Bogor, 2012.
- Kampung Bandar Agung. "Visi Dan Misi Desa Bandar Agung." Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Accessed June 29, 2022.

<http://www.kampungbandaragung.com/index.php/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ‘Perspektif.’”
Accessed June 26, 2022. <https://kbbi.web.id/perspektif>.

Rahman, Tasnim. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dalam Meningkatkan Fungsi Karang Taruna*. Skripsi: UIN Jambi, 2021.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, Bab XA Hak Asasi Manusia, n.d.

“UU_2009_40.Pdf.” Accessed June 27, 2022. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf.

